

PERLINDUNGAN PERAWAT PEREMPUAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN 2011

Dyah Suryani

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Abstract

The population of Indonesia is very large, the majority are women, if properly guided and directed it will be workers who are very favorable for development efforts. Protection policies that are specific to women workers in addition directed to ensure the safety and health associated with reproductive functions inherent in self female workers also ensure equality of employment opportunities and the security treatment without discrimination in the workplace (equality and gender justice). As a safeguard against the work need to be increased through improved working condition, working condition, as well as working relationship in order to improve the welfare of workers as a whole and for workers and protection of women need to be considered in accordance with the status and dignity. PKU Muhammadiyah Hospital in Yogyakarta that is one of the mayor hospitals in Yogyakarta City are certainly a lot of hiring nurse with the number of male nurse as many as 175 people and nursing women as many as 226 people. By employing female nurse was then the hospital must also provide the rights of women to nurse in accordance with the minimum set by law. The purpose of this study was to find out execution protection against female nurses in PKU Muhammadiyah Hospital in Yogyakarta.

The subject of this study was female nurses who were taken as many as 3 people and the head of personal. Data taken by the interview guide. This was qualitative research. Data analysis was done by using an explanation (explanation building).

Implementation of working time there is excess of 2 hours for shift 3 (night) that have not been counted as overtime, RSU PKU Muhammadiyah imposed only official holiday for 3 day, the granting of maternity leave / birth / biological autumn, annual leave has been granted in accordance with the regulations, provision of food and drinks for female nurses who work in night shift has not complied with, the implementation of remuneration are accordance with existing regulations, the implementation Jamsostek compliance with regulations.

Keywords : Protection, Nurses, Women

1. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, dimana sebagian besar adalah perempuan apabila dibina dan diarahkan dengan baik maka akan menjadi pekerja /buruh yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan. Kedudukan sosial ekonomi pekerja/buruh selalu menempati pada posisi yang lemah sehingga perlu adanya campur tangan pihak pemerintah yang secara yuridis mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara tanpa terkecuali.

Perlindungan pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan khusus terhadap pekerja/buruh perempuan, anak, penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah kesejahteraan dan jaminan sosial. Kebijakan perlindungan yang bersifat khusus terhadap pekerja perempuan selain diarahkan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan terkait dengan fungsi reproduksi yang melekat pada diri pekerja/buruh

perempuan juga menjamin kesamaan kesempatan kerja dan keamanan perlakuan tanpa diskriminasi di tempat kerja (kesetaraan dan keadilan gender).¹

Pelaksanaan di lapangan masih dapat kita jumpai pelaku produksi dalam hal ini pengusaha dan pekerja/buruh belum mengetahui hak dan kewajiban pekerja/buruh perempuan. Pengusaha belum atau tidak memberikan hak kepada pekerja/buruh perempuan dikarenakan oleh dua sebab yaitu pertama karena benar-benar belum mengetahui akan hak dan kewajiban pekerja/buruh perempuan dan kedua karena adanya faktor kesengajaan dari pengusaha atau pura-pura tidak tahu. Bagi pekerja/buruh, hal ini dikarenakan tidak mengetahui hak-haknya, sebab apabila sudah mengetahui hak-haknya biasanya pekerja/buruh menuntut, apalagi dalam era reformasi seperti saat ini kecuali alasan lain seperti ketakutan akan kehilangan pekerjaan.²

Rumah sakit yang merupakan penyelenggara upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit sudah barang tentu banyak memerkerjakan perawat perempuan, karena sifat pekerjaannya sebagai pelayanan publik maka operasinya berjalan terus atau 24 jam dan tentu saja harus buka terus walaupun itu hari minggu maupun hari libur resmi. Waktu istirahat dalam satu minggu tidak harus jatuh pada hari sabtu dan minggu.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang merupakan salah satu Rumah Sakit besar di Kota Yogyakarta sudah barang tentu banyak memerkerjakan perawat dengan jumlah perawat laki-laki sebanyak 175 orang dan perawat perempuan sebanyak 226 orang. Pihak Rumah Sakit dalam memerkerjakan perawat perempuan harus memberikan hak-hak kepada perawat perempuan minimal sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan terhadap perawat perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan perlindungan terhadap perawat perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus³ yaitu penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian hingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap.⁴

Subjek dalam penelitian ini adalah perawat perempuan serta kepala bagian personalia yang berjumlah 3 orang. Alasan mengambil sampel 2 pekerjaan tersebut untuk kros cek kebenaran data yang diberikan dan diambil secara *purposive sampling*. Pada teknik *purposive sampling*, sampel yang diambil adalah sumber yang mengetahui permasalahan yang ada dari pihak-pihak terkait pekerja wanita.

Analisis data dilakukan dengan teknik penjelasan (*explanation-building*) semua sumber diperiksa dan dievaluasi bersama sehingga temuan dalam studi kasus tersebut merupakan gabungan informasi dari sumber yang berbeda. Analisis data dilakukan dengan transkrip wawancara dan merumuskan hasil wawancara untuk mendapatkan hasil tentang perlindungan perawat perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil yang didapat dipertajam kembali dengan temuan-temuan ketika observasi ataupun hasil data sekunder.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jumlah Perawat

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Perempuan	226	56,36
2.	Laki-laki	175	43,64
TOTAL		401	100

B. Data Tentang Perlindungan Pekerjaan Perempuan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

1) Waktu Kerja

Berdasarkan hasil penelitian bahwa waktu kerja di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta terbagi menjadi 3 *shift* yaitu (1) *shift* pagi : jam 07.00 – 14.00; (2) *shift* siang : jam 14.00 – 21.00 dan (3) *shift* malam : jam 21.00 – 07.00. Pernyataan tersebut didasarkan informasi yang diperoleh dari kepala personalia sebagai berikut:

“di rumah sakit PKU ini terbagi menjadi 3 shift yaitu shift pagi, siang dan malam, kalau pagi antara jam 07.00 – 14.00, siang antara jam 14.00 – 21.00 dan malam antara 21.00 – 07.00”.

2) Bekerja pada hari libur resmi

Pekerja yang bekerja di suatu instansi wajib tidak bekerja di hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, diperbolehkan bekerja dihari-hari tersebut tetapi harus dibayar upah lemburnya. RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta ternyata tidak demikian seperti yang ditetapkan pemerintah, hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

“disini tidak ada hari libur resmi, hanya pada hari-hari raya untuk agama Islam saja apabila masuk kerja diberikan insentif seperti pada malam Idul Fitri selama 2 hari dan Idul Adha.”

3) Waktu Istirahat

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruhnya seperti istirahat antara jam kerja, istirahat mingguan, cuti tahunan, cuti haid, cuti hamil/melahirkan/gugur kandungan. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari perawat di RSU Muhammadiyah Yogyakarta sebagai berikut:

“ada cuti seperti cuti tahunan, cuti melahirkan, kalo cuti haid gak pernah mendengar”
“cuti melahirkan/hamil, cuti tahunan selama 12 hari, kalo kita jaga pada shift selama 2 malam berturut-turut kita diberikan libur sehari”

4) Pekerja Malam Perempuan

Perawat di RS memang sebagian besar adalah perempuan dan mereka memang memungkinkan sekali mendapatkan shift malam yaitu antara 21.00

– 07.00 sehingga perlu diberikan perlindungan dan hak-haknya sebagai pekerja perempuan yang memang banyak risikonya. Hasil informasi yang diperoleh tentang perlindungan pekerjaan perempuan sebagai berikut:

“memang kami sering dapat shift malam, biasanya kami dapat voucher makan yang dapat ditebus di swalayan rumah sakit tetapi tidak harus makan juga, biasanya kami menggantinya dengan keperluan sehari-hari seperti sabun, deterjen dan lain-lain.”

“dapat voucher makan baik shift pagi, siang maupun malam yang dapat ditebus di swalayan rumah sakit akan tetapi boleh juga dikumpulkan dalam satu bulan untuk dibelikan rumah tangga yang lain”

5) Upah dan komponennya

Pekerja yang bekerja di tempat manapun harus diberikan upah yang sesuai dengan haknya. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yaitu dengan ditetapkannya upah minimum provinsi (UMP) yang sesuai dengan surat DIY No.217/KEP/November 2009 bahwa UMP untuk provinsi DIY yang berlaku mulai 1 Januari 2010 adalah Rp 745.694.

“kami dapat gaji bulanan ya lumayan bagi saya perawat baru rata-rata sebulannya dapat 1 juta lebih”

6) Keikutsertaan dalam program Jamsostek

Sesuai dengan UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek, dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa program Jamsostek wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundangan. PP No.14 tahun 1993 pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa pengusaha yang memperkejakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit 1 juta rupiah sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek. Informasi yang didapat menyebutkan:

“setahu saya ada, tapi saya tidak begitu paham, yang jelas sudah diikutkan jamsostek”.

C. Pembahasan

1) Waktu kerja

Waktu kerja di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta terdiri atas 3 shift : Shift 1 antara 07.00 – 14.00, shift 2 antara 14.00 – 21.00, shift 3 antara 21.00 – 07.00. Shift 3 terdapat kelebihan 2 jam yang saat ini belum diperhitungkan sebagai jam lembur. Sebenarnya perusahaan dapat mengatur shift seperti shift 1 antara jam 07.00 – 15.00, shift 2 jam 15.00 – 23.00 dan shift 3 jam 23.00 – 07.00 dengan memberikan masing-masing 1 hari terpendek dalam setiap minggunya sehingga tidak mempunyai kewajiban membayarkan

upah lemburnya.

2) Bekerja pada hari libur resmi

Hari libur resmi di RS PKU Muhammadiyah yang baru diberlakukan adalah hari raya Idul fitri selama 2 hari dan Idul Adha. Hal ini berarti bahwa RS PKU Muhammadiyah belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut. RS PKU Muhammadiyah harus memberikan upah lembur bagi perawat yang bekerja pada hari-hari libur resmi yang sudah ditentukan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 233/MEN/2003 menyatakan bahwa libur resmi yang diakui pemerintah yaitu: Tahun Baru, Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri 2 hari, Idul Adha, 1 Muharam, Maulid Nabi Muhammad SAW, Wafat ISA Al masih, Natal, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Waisak, Hari Raya Imlek.

3) Waktu Istirahat

RSU PKU Muhammadiyah telah memberikan waktu istirahat sesuai dengan yang ditetapkan seperti ada istirahat selama jam kerja yaitu selama 1 jam bergantian dengan perawat jaga yang lain, ada cuti tahunan, cuti hamil/gugur kandungan dan ada cuti haid apabila ada perawat yang sakit pada waktu haid dan harus ada surat keterangan dari dokter.

Pengusaha wajib memberi waktu dan cuti kepada pekerja atau buruhnya. Adapun istirahat dan cuti tersebut antara lain⁵: Istirahat antara jam kerja, Istirahat mingguan, Cuti Tahunan, Cuti Haid, Cuti hamil/melahirkan/gugur kandungan, Kesempatan menyusui

4) Pekerja malam perempuan

Berdasarkan hasil wawancara ternyata bagi pekerja shift 3 antara jam 21.00 – 07.00 hanya diberikan voucher dan itupun ditukar dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dijual di swalayan. Hal ini tidak sesuai dengan filosofi pemberian makanan yang bergizi bagi perawat perempuan yang bekerja di malam hari. KepMenakerTrans Nomor: KEP 224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang menjalankan pekerja atau buruh perempuan antara jam 23.00 – 07.00 disebutkan bahwa makanan dan minuman yang bergizi adalah harus sekurang-kurangnya memenuhi 140 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja dan makanan tersebut tidak dapat diganti dengan uang.

5) Pengupahan

Upah yang diterima oleh perawat perempuan di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta ini sudah sesuai dengan UMP di Yogyakarta karena ada gaji pokok sebanyak Rp 600.000,00 kemudian masih ditambah dengan tunjangan beras, tunjangan anak sampai diakui 3 anak, tunjangan kesejahteraan yang dihitung dengan beban kerja, tunjangan fungsional yang dihitung berbeda sesuai dengan masa kerja dan IPK yang diberikan setiap 3 bulan sekali yang dinilai dari prestasi pekerja. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yaitu

dengan ditetapkannya upah minimum provinsi yang sesuai dengan surat gubernur DIY No.217/KEP/November 2009 bahwa UMP untuk provinsi DIY yang berlaku mulai 1 Januari 2010 adalah Rp. 745.694.

6) Jamsostek

Didapatkan bahwa semua pekerja di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta secara otomatis diikutsertakan menjadi peserta Jamsostek dikarenakan itu sudah menjadi haknya dan mengikuti aturan ketenagakerjaan. Program yang diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, sedangkan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan sudah diselenggarakan sendiri dengan nama tafakul. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia. Sesuai dengan UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek dalam pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa program Jamsostek wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan kerja di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundangan. PP No.14 tahun 1993 pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit 1 juta rupiah sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek yang meliputi: jaminan yang berupa uang serta jaminan yang berupa pelayanan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan perawat perempuan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan waktu kerja terdapat kelebihan 2 jam untuk shift 3 (malam) uang belum diperhitungkan sebagai lembur.
- 2) RSU PKU Muhammadiyah hanya memberlakukan hari libur resmi selama 3 hari.
- 3) Pemberian cuti hamil/melahirkan/gugur kandungan, cuti tahunan telah diberikan sesuai dengan ketentuan.
- 4) Pemberian makanan dan minuman untuk perawat perempuan yang bekerja di shift malam belum memenuhi ketentuan.
- 5) Pelaksanaan pengupahan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan jamsostek telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

- 1) Untuk manajemen PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
 - a) Agar memberikan upah lembur terhadap kelebihan jam kerja atau mengubah waktu kerjanya.
 - b) Agar pekerja yang bekerja pada setiap hari libur resmi dibayarkan upah lemburnya.
 - c) Agar memberikan tambahan makanan dan minuman sebanyak 1.400 kalori dilaksanakan dan tidak boleh diganti.

- 2) Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
Agar memberikan pembinaan terhadap Rumah Sakit agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suharni, *Pengawasan Terhadap perlindungan Pekerja Perempuan*, Work Shope Peningkatan Pegawai Fungsional Kota Yogyakarta di Gedung DPD Gapensi DIY. 2007
2. Depnakertrans, *Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan Dan Anak*, Modul Diklat Jarak Jauh Pengawas ketenagakerjaan, Jakarta. 2005b
3. Subana, M dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung. 2005
4. Azwar, S., *Metode Penelitian*, Cetakan 5, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2004
5. Depnakertrans, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja*, Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Jakarta. 2005a